

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2021 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu, LKjIP Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain yang nantinya dapat menjadi bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 Provinsi NTB ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 dengan **Visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”** dengan menjabarkan pada **Misinya** :

- 1) NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
- 2) NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- 3) NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

- 4) NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 5) ***NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;***
- 6) NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari keenam misi tersebut diatas, misi yang diusung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Misi Lima (5), yaitu ***NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.***

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan yang ditetapkan oleh daerah adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas** Koperasi UMKM adalah: (1) Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Yang Dikelola Secara Profesional dan ditopang oleh Kegiatan Ekonomi Anggotanya, (2) Dukungan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil, dengan Indikator Kinerja, (3) Terciptanya Daya Saing KUMKM. Dengan 3 (tiga) langkah tersebut, maka Koperasi dan UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **2. Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, disamping itu merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Koperasi dan UMKM, baik kepada Gubernur selaku atasan dan pemberi mandat maupun kepada masyarakat umum (publik).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yaitu mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu strategis dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 - 2023.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan laporan ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember 2021).

## **4. Gambaran Organisasi**

### **4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.

5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

#### 4.2. Susunan Organisasi

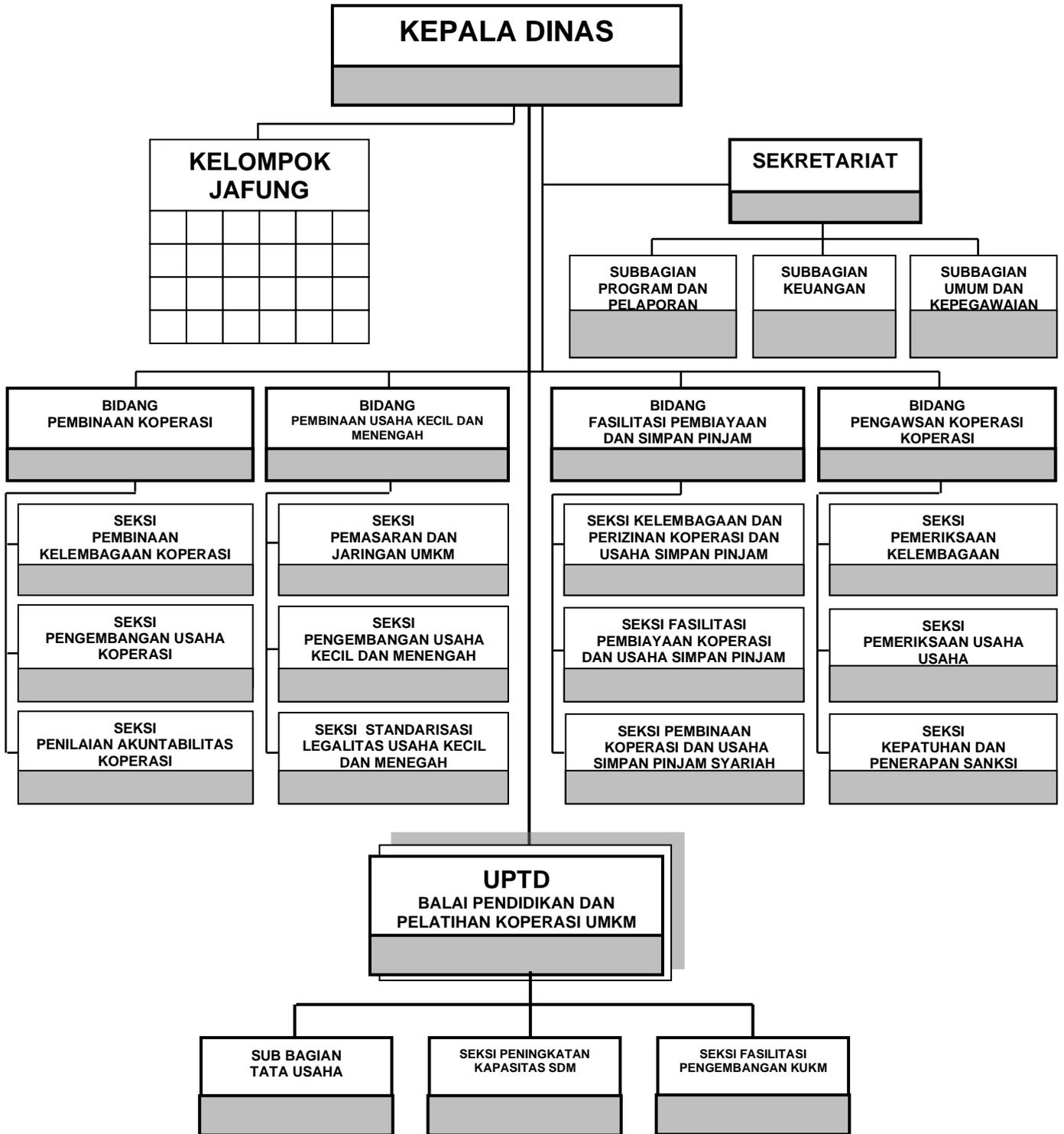
Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 tanggal 23 Nopember Tahun 2017 terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pembinaan Koperasi :
  - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi
  - c. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi.
4. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah :
  - a. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
  - c. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha Kecil dan Menengah
5. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam:
  - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam
  - b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam
  - c. Seksi Pembinaan Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam Syariah

6. Bidang Pengawasan Koperasi
  - a. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan
  - b. Seksi Pemeriksaan Usaha
  - c. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Widyaiswara
  - b. Pranata Komputer
  - c. Arsiparis
  - d. Pustakawan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
  - d. Seksi Fasilitasi Pengembangan KUMKM

4.3. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



#### 4.4. Personalia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2021 sebanyak 72 orang. Jumlah tersebut bertambah 3 orang dibanding tahun 2020 sebanyak 69 orang. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (Honorar Daerah) sebanyak 1 orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 72 orang.

**Tabel. 1.1**  
**Data Pegawai Berdasarkan Eselon**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
1	Eselon II	1 orang	
2	Eselon III	6 orang	
3	Eselon IV	19 orang	
4	Pejabat Fungsional	7 orang	
5	Pegawai Non Struktural	38 orang	
6	P T T	1 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>72 orang</b>	

*Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021*

**Tabel. 1.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

No.	Gol/Ruang	Jabatan			Total
		Struktural	Fungsional	Staf	
1	Golongan IV/e	-	-	-	-
2	Golongan IV/d	-	-	-	-
3	Golongan IV/c	1	1	-	2
4	Golongan IV/b	4	2	-	6
5	Golongan IV/a	5	1	2	8
6	Golongan III/d	15	3	8	25
7	Golongan III/c	1	-	1	2
8	Golongan III/b	-	-	7	7
9	Golongan III/a	-	-	4	4
10	Golongan II/d	-	-	1	1
11	Golongan II/c	-	-	8	8
12	Golongan II/b	-	-	1	1
13	Golongan II/a	-	-	2	2
14	Golongan I/d	-	-	2	2
15	Golongan I/c	-	-	1	1
16	Golongan I/b	-	-	-	-
17	Golongan I/a	-	-	-	-
18	PTT	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>72</b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021

**Tabel. 1.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB**

No	Pendidikan	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional	Staf	PTT	
1	S.2	9	4	1	-	13
2	S.1	17	3	19	1	41
3	Sarmud/D.III	-	-	1	-	1
4	SLTA	-	-	15	-	14
5	SLTP	-	-	3	-	3
6	SD	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>72</b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021

**Tabel. 1.4**  
**Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

No	Kelamin	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional	Staf	PTT	
1	Laki-laki	18	4	24	-	<b>46</b>
2.	Perempuan	8	3	14	1	<b>25</b>
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>72</b>

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021

**Tabel. 1.5**  
**Data Penyebaran Pegawai pada Masing-Masing Bidang**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

No.	U R A I A N	Keadaan 31-12-2020	Keadaan 31-12-2021	Keterangan
1	Kepala Dinas/Sekretariat + PTT	26	29	
2	Bidang Pembinaan Koperasi	7	7	
3	Bidang FPSP	7	7	
4	Bidang Pemberdayaan UMKM	8	8	
5	Bidang Penyuluhan Kop. UMKM	8	8	
6.	Balai Diklat Koperasi UMKM	13	13	
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>72</b>	

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Gambaran Organisasi

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis 2019-2023
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Permasalahan dan Solusi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis 2019 – 2023**

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Koperasi UKM menetapkan **Visi** yang tertuang pada RENSTRA 2019 - 2023, yaitu: **“Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing“**, sedangkan **Misi** adalah **“Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing Secara Global”**.

Visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas secara kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat serta mampu menyerap tenaga kerja.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut langkah yang ditempuh antara lain: 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM, 2) Meningkatkan akses KUMKM

terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan, 3) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemasaran dan daya saing produk, 4) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi, 5) Meningkatkan akses SDM terhadap sumber-sumber produktif lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding. Dalam meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi akses permodalan bagi gerakan koperasi kepada Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang berfungsi sebagai channelling kepada pinjaman produktif anggota koperasi. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong pemanfaatan dana lainnya antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN, akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN.

Pengembangan akses pasar produk UKM dilakukan melalui peningkatan kualitas produk promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses KUMKM terhadap Informasi Teknologi (IT) dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha baik dari melalui program daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2019-2023 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Koperasi, dan UKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing yang dikelola Secara Profesional dan ditopang oleh Kegiatan Ekonomi Anggotanya;
- 2) Dukungan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil;
- 3) Terciptanya Daya Saing KUKM;
- 4) Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas;
- 5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing;
- 6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan;
- 7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi;
- 8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;
- 9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- 10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender;
- 11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan, permodalan, jaringan usaha dan kemitraan;
- 12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi;
- 13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan administrasi KSP/USP yang berkualitas;

- 14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 16) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;
- 17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM;
- 18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;
- 19) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca Diklat.
- 20) Pembinaan dan Pengawasan koperasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sejahtera dan Mandiri” dengan indikator kinerja daerah yang diusung adalah persentase koperasi aktif. Perkembangan jumlah koperasi aktif di NTB dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah “Persentase Koperasi Aktif”**  
**Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2018-2021**

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	2021		Target 2023
					Target	Capaian	
Persentase Koperasi Aktif	%	60	59,61	59,25	65	59,76	70

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Tahun 2021

Tidak tercapainya target dalam tahun 2021 disebabkan karena kegiatan yang mendukung kearah pencapaian target hampir secara keseluruhan di “Refocusing” anggaran dan kegiatannya.

Jumlah koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 4.218 koperasi. Dibanding dengan periode yang sama di tahun 2019, jumlah koperasi sebanyak 4.093 koperasi, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 125 buah koperasi. Pemerintah melakukan pembubaran koperasi apabila Koperasi dikategorikan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan salah satunya jika koperasi tersebut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari 3 tahun berturut-turut dan sudah tidak memiliki kegiatan usaha, Pemerintah dalam tahun 2021 tidak melakukan pembubaran koperasi. Menurut Peraturan Menteri KUKM Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, yang dikategorikan sebagai koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Persentase koperasi aktif tahun 2021 sebanyak 59,25 persen (2.544 unit koperasi) dari target 63 persen. Perkembangan koperasi Aktif Provinsi NTB tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB**  
**Tahun 2019-2021**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2019 (Unit)			Tahun 2020 (Unit)			Tahun 2021 (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Jml	Aktif	Tidak Aktif	Jml	Aktif	Tidak Aktif	Jml
1	Mataram	397	107	504	398	107	505	401	107	508
2	Lombok Barat	151	360	511	163	357	520	171	357	528
3	Lombok Utara	119	42	161	123	42	165	129	42	171
4	Lombok Tengah	299	318	617	315	318	633	264	394	658
5	Lombok Timur	215	303	518	241	303	544	269	298	567
6	Sumbawa Barat	329	50	379	316	64	380	324	64	388
7	Sumbawa	224	86	310	224	86	310	233	86	319
8	Dompu	150	164	314	150	180	330	148	189	337
9	Bima	238	50	288	238	50	288	214	84	298
10	Kota Bima	95	103	198	108	100	208	110	103	213
11	Provinsi	223	70	293	223	90	335	281	90	371
<b>Jumlah</b>		<b>2.440</b>	<b>1.653</b>	<b>4.093</b>	<b>2.499</b>	<b>1.697</b>	<b>4.218</b>	<b>2.544</b>	<b>1.814</b>	<b>4.358</b>

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan jumlah koperasi aktif dan meningkatkan kapasitas UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen, serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi pemasaran koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan kemampuan UMKM dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan pasar dan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya, terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia, melalui penguatan akses permodalan, basis produksi dan akses pasar.
- c. Meningkatkan kualitas dan koordinasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian berusaha bagi UMKM dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin perkembangan koperasi dan UMKM.

**Tabel 2.3**

**Jumlah dan Skala Usaha  
Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar  
Berdasarkan Data Statistik Per Kab/Kota se NTB  
Per 31 Desember 2021**

No	Kab/Kota	Klasifikasi Usaha		Jumlah
		Usaha Mikro Kecil (UMK)	Usaha Menengah Besar (UMB)	
1	Mataram	55.220	1.702	56.922
2	Lombok Barat	13.193	261	84.334
3	Lombok Utara	28.432	120	28.552
4	Lombok Tengah	120.701	503	121.204
5	Lombok Timur	148.699	619	149.318
6	Sumbawa Barat	13.193	240	84.334
7	Sumbawa	41.783	554	42.334
8	Dompu	27.361	190	27.551
9	Bima	55.986	277	53.263
10	Kota Bima	21.507	324	21.831
	<b>Jumlah</b>	<b>593.755 (99,2%)</b>	<b>4.954 (0,8%)</b>	<b>598.709 (100%)</b>

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah**  
**Provinsi NTB menurut Statistik per Kab/Kota se NTB**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Kab/Kota	Tahun 2006	Tahun 2016	Perkembangan	
				Jumlah	%
1	Mataram	46.098	56.922	10.824	19,02
2	Lombok Barat	108.606	84.334	-24.272	-28,78
3	Lombok Utara	116.919	121.204	4.285	3,54
4	Lombok Tengah	-	28.552	-	-
5	Lombok Timur	144.171	149.318	5.147	3,45
6	Sumbawa Barat	8.104	13.397	5.293	39,51
7	Sumbawa	38.788	42.337	3.549	8,38
8	Dompu	21.842	27.551	5.709	20,72
9	Bima	42.510	53.263	10.753	20,19
10	Kota Bima	17.569	21.831	4.262	19,52
<b>Jumlah</b>		<b>544.607</b>	<b>598.709</b>	<b>25.550</b>	<b>4,27</b>

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 123.787 unit UMKM dengan rincian dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah**  
**Provinsi NTB menurut data Dinas Koperasi UKM**  
**Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Kab/Kota	Klasifikasi Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Mataram	15.746	6.194	533	22.473
2	Lombok Barat	16.635	0	0	16.635
3	Lombok Utara	4.820	173	5	4.998
4	Lombok Tengah	20.826	0	0	20.826
5	Lombok Timur	14.356	6.390	284	21.030
6	Sumbawa Barat	7.780	49	0	7.829
6	Sumbawa	5.501	4	3	5.508
7	Dompu	2.261	5	4	2.270
8	Bima	11.610	0	0	11.610
9	Kota Bima	7.904	2.294	411	10.608
<b>Jumlah</b>		<b>107.439</b>	<b>15.108</b>	<b>1.240</b>	<b>123.787</b>

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

#### **A. UMKM Binaan**

##### **1. Perkembangan UMKM Binaan**

Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 UMKM yang dibina sejumlah 4.421 UMKM. Hal ini sesuai dengan program kegiatan yang tertuang pada DIPA dan DPA Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Perkembangan jumlah UMKM per Kabupaten/Kota terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Jumlah UMKM yang dibina**  
**Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2017 – 2021**

No	Kab/Kota/Prov.	T A H U N					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Provinsi	60	100	0	0	31	191
2	Kota Mataram	69	107	10	22	739	937
3	Lombok Barat	224	104	10	22	125	475
4	Lombok Utara	104	81	10	22	0	217
5	Lombok Tengah	104	124	10	62	131	441
6	Lombok Timur	313	205	10	22	342	892
7	Sumbawa Barat	74	105	10	10	11	210
8	Sumbawa	104	114	10	10	0	238
9	Dompu	44	139	40	40	0	263
10	Bima	104	138	40	10	0	292
11	Kota Bima	44	141	40	40	0	265
	Jumlah	1.244	1.358	190	260	1.379	4.421

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

#### **B. Sentra UMKM**

Untuk lebih efektifnya Pembinaan dan pendampingan kepada UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendamping PLUT, konsultan PLUT dan pendamping Diklat telah menginisiasi pembinaan UKM melalui sentra-sentra yang ada di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, adapun jumlah sentra di Provinsi NTB adalah sebanyak 73 sentra dengan jumlah UMKM dalam sentra sebanyak 13.478 UMKM dengan rincian dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Sentra UMKM Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Kabupaten/Kota	Sentra	Jumlah UMKM	Keterangan
1	Mataram	7	1.510	
2	Lombok Barat	10	2.558	
3	Lombok Tengah	8	1.635	
4	Lombok Utara	7	1.036	
5	Lombok Timur	7	2.155	
6	Sumbawa Barat	5	607	
7	Sumbawa	9	1.183	
8	Dompu	6	865	
9	Bima	7	979	
10	Kota Bima	7	950	
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>13.478</b>	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Didalam masa Pandemi Covid-19 UMKM dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi, jenis usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang dagangan. Pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan aktivitas maupun mobilitas orang dan barang berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat sehingga mengurangi permintaan terutama pada aktivitas penyediaan makanan dan minuman, industri, transportasi, jasa hiburan dan perdagangan. Pemerintah berupaya menggiatkan aktivitas ekonomi masyarakat agar memiliki kemandirian melalui kebijakan stimulus ekonomi, mendorong pemberdayaan UMKM dan IKM untuk tetap memproduksi, produk dalam JPS menggunakan produk UMKM/IKM berbasis sumber daya lokal.

Pemerintah Provinsi NTB, dalam pemberdayaan UMKM terdampak Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan usaha UMKM untuk kembali menggerakkan pelaku UMKM telah melaksanakan kebijakan stimulus ekonomi berupa pemberdayaan produk lokal UMKM/IKM di NTB sebagai bagian dari JPS Gemilang berupa produk UMKM (minyak kelapa, ikan kering/ikan teri, garam, abon, susu kedelai, gula aren, kopi, serbat, teh kelor, kue kering dan masker).

## **Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional**

Penilaian “Koperasi Berprestasi” setiap tahun dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan penghargaan atas sumbangsih dan dharma baktinya yang besar terhadap pertumbuhan koperasi. Penilaian dilihat dari pencapaian kinerja yaitu aspek organisasi, tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak dari koperasi. Penilaian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, yang mana penghargaan dan hadiah diberikan kepada Koperasi Berprestasi baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tingkat Nasional pada setiap Peringatan Hari Koperasi. Adapun daftar nama Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi NTB maupun tingkat Nasional tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 835/97/Diskop UKM/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 “Koperasi berprestasi Tahun 2019” adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI / NO. BADAN HUKUM	ALAMAT	PERINGKAT	KET
1.	Koperasi Unit Desa (KUD) Karya No. 147/BH/PAD/KWK.23/VI/96 tanggal 18 Juni 1996	Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah	JUARA I	
2.	KPRI Usaha Bersama No. 429/BH/XXII Tanggal 23 Oktober 1978	Jln. Persinggahan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu	JUARA II	
3.	KPRI Pasar Seni Bina Harapan Sejahtera, No. 03/644/BH/XXVIII/ Diskop UKM Perindag/X/2011	Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat	JUARA III	
4.	KSPPS Gumarang Akbar Syariah No. 518/277/BH/XXVIII/Diskop UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014	Jln. Sriwijaya No. 20 Kota Mataram	JUARA HARAPAN I	
5.	Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa No. 33/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 19 April 1999	Jln. Lintas Bima	JUARA HARAPAN II	

Berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 835/075/Diskop.UKM/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 “Koperasi berprestasi Tahun 2020” adalah sebagai berikut :

No	Nama Koperasi / No. Badan Hukum	Alamat	Peringkat	Ket
1.	KPRI Usaha Teratai Kab. Bima No. BH. 320b/BH/PAD/KWK.23/VIII/ 1995	Jln. Ir. Sutami No. 45 Raba Dompu, Kabupaten Bima	JUARA I (84,25)	
2.	KPRI Usaha Kita Kab. Bima No. BH. 175b/PAD/KWK.23/V/1995	Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima	JUARA II (83,50)	
3.	KSU Syariah BMT Al Hidayah Umat Sejahtera Kab. Lombok Timur No. BH. 231/BH/DKP.085/XII/2006, Tgl, 26 Desember 2006	Kecamatan Kotaraja Kec. Sikur, Kabupaten Lombok Timur	JUARA III (81,60)	
4.	Koperasi Syariah Sarian Amanah Mekar Mandiri Sumbawa Barat No. BH 009833/BH/M.KUKM.2/ IX/2018, Tgl, 29 Sep. 2018	Jln. Pendidikan RT 008 RW 004 Beru Kelurahan Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat	JUARA HARAPAN I (80,00)	
5.	KUD Karya Batur Kab. Lombok Tengah No. BH. 716a/BH/KWK.23/VI/ 1995. Tgl, 20 Juni 1995	Desa Sukarare Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah	JUARA HARAPAN II (78,75)	
6.	Kopsyah Ngiring Tunas Paice No. BH. 518.08/232/BH/XII/ 2002. Tgl, 24 Desember 2019	Desa Barejulat Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah	JUARA HARAPAN III (76,00)	

Koperasi berprestasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut

No	Nama Koperasi / No. Badan Hukum	Alamat	Ket
1.	Kopkar Katala Batu Hijau No. BH 518/32/BH/PAD/XXVIII/Diskop UKM/X/2012, tgl, 30 Oktober 2012	Maluk Sumbawa	
2.	KSU Syariah BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera, No. BH 231/BH/DKP.08.5/XII/ 2006, tgl, 26 Desember 2006	Jln. Jurusan Kotaraja, Tete Batu, Sikur, Kab. Lombok Timur	
3.	KUD Karya Batur No. BH. 716a/BH/KWK.21/VI/1995. Tgl, 20 Juni 1995	Desa Sukarare Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah	

### **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi (KSPPS/USPPS - Kop)**

Salah satu program yang menjadi andalan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah pembentukan “Koperasi Kawasan Bebas Riba” dan penumbuhan serta pengembangan “Koperasi Berbasis Syari'ah”.

Target dan realisasi penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba di Provinsi NTB per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Target dan Realiasi Program Penumbuhan**  
**Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba**  
**di Provinsi NTB Tahun 2021**

No.	Wilayah	Program Tahun 2019 s/d 2023								Jumlah
		2019		2020		2021		2022	2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Provinsi NTB	3	3	3	3	3	3	3	3	15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2021

Dalam upaya penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah, Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Melakukan rekrutmen pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi se-NTB.
- b. Muswil Perkopsyah dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penguatan peran untuk mensukseskan NTB Gemilang
- c. Rakor penguatan peranan PERKOPSYAH dan IAEI dalam rangka pengembangan KSPPS/USPPS-Koperasi
- d. Rapat Koordinasi Kemitraan Baznas dan Perkopsyah dengan Kab/Kota Se NTB
- e. Bimtek pengawasan bagi calon Dewan Pengawas Syariah Kab/Kota Se-NTB
- f. Bimtek Pengembangan SDI Pengurus dan Pengelola KSPPS/USPPS
- g. Sosialiasi kawasan bebas riba pada kopsyah di Kab/Kota se-NTB
- h. Rapat evaluasi pendampingan penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi
- i. Workshop system administrasi pendaftaran dan tata naskah pembentukan dan perubahan anggaran dasar KSPPS/USPPS koperasi bagi notaris selaku PPAK se-NTB
- j. Memfasilitasi pembuatan akte anggaran dasar KSPPS/USPPS dan akta perubahan anggaran dasar dari konvensional ke KSPPS/USPPS koperasi

- k. Koordinasi pengembangan koperasi syariah ke Kab/Kota se-NTB
- l. Monitoring kegiatan pendampingan penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS koperasi

Pencapaian program pengembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah melalui beberapa kegiatan antara lain:

- a. Penumbuhan Koperasi Syariah

Pada akhir 2020 telah terealisasi sejumlah 387 koperasi berbasis syariah, dan sampai dengan tahun 2021 telah terealisasi sejumlah 398 koperasi berbasis syariah. Penumbuhan Koperasi Syariah pada tahun 2021 sebanyak 10 Koperasi Syariah.

- b. Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba

Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba Tahun 2021 telah memenuhi target capaian penumbuhan, yaitu sebanyak 3 koperasi dari target sebanyak 3 koperasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah Koperasi syariah kawasan bebas riba berjumlah 10 (sepuluh) koperasi yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan di Provinsi.

**Tabel 2.9**  
**Rencana Program Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba**  
**Tahun 2019 s/d 2023**

No.	Program Kegiatan	Program Tahun 2019 s/d 2023					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba Wilayah Provinsi NTB	3	3	3	3	3	15

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2021

**Tabel 2.10**  
**Rencana Program Penumbuhan Koperasi Syariah Provinsi NTB**  
**Tahun 2019 s/d 2023**

No.	Program Kegiatan	Program Tahun 2019 s/d 2023					Jml.
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penumbuhan Koperasi Syariah Wilayah Provinsi NTB	5	7	10	15	20	57

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2021

**Tabel 2.11**  
**Koperasi Syari'ah Tahun 2019 s/d 2023**

<b>NO</b>	<b>KAB./ KOTA</b>	<b>TARGET</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Binaan Provinsi	15	18	17	22	7	11	90
2	Mataram	40	8	2	1	1	0	27
3	Lombok Barat	85	0	2	2	0	0	35
4	Lombok Utara	35	0	5	0	0	0	16
5	Lombok Tengah	85	36	8	15	1	4	102
6	Lombok Timur	100	7	4	2	0	0	61
7	Sumabaw Barat	20	0	0	0	0	0	12
8	Sumbawa	30	0	0	0	0	0	11
9	Dompu	30	9	0	0	0	0	16
10	Kab. Bima	35	6	0	0	1	0	33
11	Kota Bima	25	8	0	0	0	0	10
	<b>Jumlah</b>	<b>500</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>413</b>
	<b>Total Jumlah</b>	<b>500</b>	<b>308</b>	<b>346</b>	<b>388</b>	<b>398</b>	<b>413</b>	<b>413</b>

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2021

**Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Pengembangan Program Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah.**

Dalam upaya penumbuhan Koperasi Syari'ah, Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB melakukan berbagai Program kegiatan yaitu :

1. Rapat Koordinasi Temu Kemitraan Dinas Koperasi UKM Prov./Kab/ Kota Se-NTB dengan Baznas Provinsi/Kab./Kota dan KSPPS/USPPS Koperasi. Rapat Koordinasi Temu Kemitraan Dinas Koperasi UKM, Gerakan Koperasi Syariah dan Baznas Provinsi, Kab./Kota se-NTB.

Tujuan :

- Mensinergikan program yang ada pada Baznas dan Gerakan Koperasi Syariah dalam upaya mensejahterakan anggota dan masyarakat.

- Membangun kekuatan menggerakkan potensi yang ada diharapkan mempercepat pencapaian hakekat tujuan berkoperasi adalah Mensejahterakan Anggota dan Masyarakat pada umumnya.
2. Rapat Koordiansi penguatan Peran Perkopsyah dalam rangka Penubuhan dan Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB.

Tujuan :

- Mengkoordinasikan program yang telah dan akan dilaksanakan dengan PERKOPSYAH, Lembaga Terkait dan Gerakan Koperasi. Menggerakkan potensi yang ada untuk tercapainya program strategis Mengembangkan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba di NTB.
3. Mencari upaya bersama menyatukan pemahaman dan dan istikomah pengamalan oleh msyarakat di kawasan bebas riba tentang haramnya riba dan menghindarkan masyarakat dari praktik Rentenir.
  4. Bimtek Manajemen Koperasi Syariah bagi Pengurus/Pengelola/Manajer Koperasi Syariah Kab/Kota Se-NTB

Tujuan :

- Meningkatkan Sumber Daya Insani bagi para Pengurus, Pengelola dan Manajer Kopsyah dalam membangun Koperasi yang Sehat, Tangguh dan Mandiri menuju koperasi yang Modern (Kreatif, Responsif, Normatif)
  - Meningkatkan Pemahaman Manajemen para Pengurus, Pengelola dan Manajer Kopsyah untuk lebih inovatif sesuai zaman kekinian.
5. Fasilitasi Pembentukan dan Perubahan Akta Anggaran Dasar KSPPS/USPPS Koperasi.

Kegiatan ini sebagai upaya menumbuhkan Koperasi Syariah di NTB, pencapaian penumbuhan Koperasi Syariah yang difasilitasi sebanyak 15 Kopsyah.

6. Pemberian Penghargaan kepada Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba

Kegiatan ini sebagai bentuk Perhatian Pemerintah dalam rangka meningkatkan

efektivitas pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) agar dapat produktif, efisien yang bertumpu pada nilai keadilan dan bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai syari'ah, maka dikembangkan strategi melalui pendekatan pemberdayaan kawasan bebas riba.

Penerima Penghargaan Kopsyah Pengembangan Kawasan bebas Riba :

- a) Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Karya Mabruur Bersama" (Akta Notaris: Nomor 47 Tanggal 28 Agustus 2019)  
Alamat Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kec. Selaparang - Kota Mataram
- b) Koperasi Syariah Amanah Mekar Mandiri (Akta Notaris: Nomor 85 Tanggal 31 Juli 2018)  
Alamat Jalan Pendidikan Pasar Baru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat
- c) Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Insan Samawa. (Akta Notaris : Nomor 24 Tanggal 27 April 2021/Akta Perubahan)  
Alamat Jalan Setia Budi No. 12 A Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa

7. Pemberian Bantuan dana Hibah Penguatan Modal Koperasi Syariah.

Tujuan Program ini sebagai upaya pemulihan usaha koperasi Syariah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada anggota maupun masyarakat akibat dampak Covid 19.

Penerima dana Hibah sebagai berikut :

- a) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Alama Jalan Arif Rachman Hakim Nomor 36 B Mataram – Kota Mataram
- b) KSP Syariah Ash Shaff Kab. Lombok Tengah Alamat Jalan Diponegoro, Benteng Desa Taman Indah Kec. Pringgarata Kab.Lombok Tengah

## **Pencapaian Program Pengembangan Koperasi Syariah/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS)**

### **a. Pertumbuhan Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS)**

Target Terbentuknya Koperasi Syariah pada tahun 2016 sebanyak 500 Koperasi syariah, Jumlah Koperasi Syariah sampai dengan tahun 2021 terbentuk sebanyak 413 Koperasi Syariah Kab/Kota Se NTB. Untuk Penumbuhan Koperasi syariah Wilayah Kerja Propinsi tahun 2021 target RPJM tahun 2021 sebanyak 10 Koperasi Syariah Binaan Provinsi, Pencapaian realisasi berjumlah 11 Kopsyah artinya melampaui jumlah yang ditargetkan, Total Jumlah Koperasi Syariah Wilayah kerja Provinsi Per Desember Tahun 2021 sebanyak 90 Koperasi Syariah.

### **b. Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba**

Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba Tahun 2021 telah memenuhi target capaian RPJMD dengan penumbuhan sebanyak 3 Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba. Sampai dengan tahun 2021 Jumlah Koperasi syariah kawasan bebas riba berjumlah 12 Koperasi Syariah tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se-NTB.

## **Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)**

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Provinsi NTB merupakan lembaga yang bernaung dibawah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada KUMKM secara komperhensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya. Di dalam fungsinya sebagai lembaga pendamping, PLUT-KUMKM memiliki 7 (tujuh) bidang layanan pendampingan diantaranya adalah

Bidang Kelembagaan, Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Bidang Pembiayaan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi, Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha.

Sebagai Pusat Layanan berarti PLUT-KUMKM merupakan sebuah lembaga yang senantiasa memberikan layanan kepada Koperasi dan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu atap yang mampu memberikan solusi bagi pelaku KUMKM secara komprehensif dan efektif sehingga mampu mengembangkan potensi unggulan daerah untuk menjadi produk dan komoditas unggulan.

**a. Sasaran/Target Capaian Tahun 2021 :**

1. Jumlah UMK dan wirausaha yang dilayani : 990 UMKM
2. Jumlah Koperasi yang dilayani : 32 Koperasi
3. Jumlah Koperassi yang mendapat sertifikat NIK : 0 Koperasi
4. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perijinan : 5 Koperasi dan 200 UMKM
5. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses Pemasaran Online; 30 UMKM
6. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh Akses Pembiayaan dan Termasuk KUR : 80 UMKM
7. Jumlah Koperassi, UMK dan wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya : 10 KUMKM
8. Jumlah Pelayanan PLUT : 7 Bidang Pelayanan
9. Target Kualitas Layanan PLUT : Efisien dan Efektif

b. Program dan Kegiatan tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Tempat	Penanggung Jawab	Ket
1	Publikasi PLUT KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinnsi NTB	Sosialisasi PLUT KUMKM melalui pelatihan, pertemuan dll Melalui Pendampingan di Lokasi UMKM Market Place Gallery PLUT KUMKM NTB Penyebaran melalui Medsos tentang Kegiatan Kegiatan Pendampingan	Publikasi ini di tujukan kepada KUMKM dan masyarakat luas	Senin s/d Jum'at Tentatif sesuai Jadwal Bimtek dan undangan dari pihak lain Maret-Desember 2021	5 Kabupaten/ Kota Se Pulau Lombok 5 Kabupaten/ Kota Se Pulau Lombok PLUT KUMKM Media sosial	7 Pendamping	
2	Kualifikasi usaha bagi 10 Wirausaha Mikro ke skala Kecil (UMKM Naik Kelas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan UMKM yang menjadi sasaran Dampingan bersama d</li> <li>2. Temu Konsultasi Pendamping dengan UMKM sasaran               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan Temu Konsultasi</li> <li>b. Identifikasi masalah Usaha</li> <li>c. Menyusun langkah langkah dalam mengatasi masalah usaha sasaran Dampingan</li> </ol> </li> <li>3. Pendampingan bersama terhadap sasaran dampingan</li> <li>4. Memfasilitasi kebutuhan sasaran dampingan agar menjadi UMKM naik kelas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan tentang wirausaha dan Manajemen Usaha</li> <li>b. Pelatihan Pembukuan</li> <li>c. Penyuluhan kemaman Pangan</li> <li>d. Memfasilitasi tentang sertifikasi Produk</li> <li>e. Memfasilitasi Pembuatan Proposal</li> </ol> </li> </ol>	Pelaku Usaha Mikro	Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB	7 Pendamping	

		f. Memfasilitasi akses pasar 5. Testimoni sasaran dampingan					
3	5 Pelaku UMKM mendapatkan Akses Pelayanan Bahan Baku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan UMKM yang kesulitan dalam akses bahan baku</li> <li>2. Mendata Kebutuhan baku yang dibutuhkan UMKM (volume, kriteria, dan harga)</li> <li>3. Pemetaan Pelaku usaha yang melakukan Pengadaan Bahan baku sesuai dengan kebutuhan UMKM dampingan</li> <li>4. Memfasilitasi sasaran dampingan dengan suplier untuk bisa membangun relasi dalam jangka pendek maupun dan jangka panjang.</li> </ol>	Pelaku usaha Industri olahan	Maret-Desember 2021	PLUT KUMKM NTB dan dilokasi UMKM	Pendamping Bidang Produksi dan Bidang Kerjasama	
4	100 UMKM mendapatkan pelayanan informasi Pengolahan Produk yang baik dan hygenis (CPPOB) serta penerapan teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi melalui media pamflet kepada UMKM yang berisi tentang tata cara pengolahan Produk/pangan yang baik dan benar.</li> <li>2. Memberikan informasi terkait penggunaan teknologi tepat guna.</li> <li>3. Melalui konsultasi di PLUT KUMKM NTB atau di lokasi UMKM</li> </ol>	Pelaku UMKM Yang bergerak di sektor olahan Makanan dan lainnya	Maret-Desember 2021	PLUT KUMKM NTB dan di lokasi UMKM	Pendamping Bidang Produksi	
5	10 UMKM di fasilitasi dalam pembuatan Desain Produk (Kemasan dan Pelabelan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan UMKM</li> <li>2. Memfasilitasi UMKM dalam proses pembuatan Desain Produk (Kemasan dan Pelabelan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha olahan makanan</li> <li>2. Pelaku usaha lainnya.</li> </ol>	Maret-Desember 2021	PLUT KUMKM NTB dan dilokasi UMKM	Pendamping Bidang Produksi dan Pendamping Pemasaran	

6	10 UMKM di Fasilitas Sertifikasi dan Standarisasi Produk (SP-PIRT, Halal, HACCP, MD, SNI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan UMKM yang belum memiliki sertifikasi produk</li> <li>2. Meninjau Lokasi Produk</li> <li>3. Pengarahan tentang Lokasi Produksi yang baik dan benar</li> <li>4. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi</li> <li>5. Memfasilitasi sasaran dampingan dalam mengikuti penyuluhan keamanan Pangan</li> <li>6. Pembuatan dokumen Persyaratan Pengajuan sertifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha olahan makanan</li> <li>2. Pelaku usaha lainnya</li> </ol>	Maret-Desember 2021	Tentatif	Pendamping Bidang Produksi dan Pendamping Bidang Jaringan Kerjasama	
7	20 Penumbuhan Wirausaha Baru	Sosialisasi Kewirausahaan melalui pelatihan, pertemuan dll (teknik pengolahan, Pelatihan Vocational, Manajemen Usaha)	Komunitas Perempuan, Pemuda dan Mantan Pekerja Migran Indonesia	Maret-Desember 2021	PLUT KUMKM NTB dan di Lokasi sasaran Pendampingan	Pendamping Bidang SDM	
8	10 UMKM memiliki Pembukuan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran UMKM yang belum memahami tentang tata cara Pembukuan usaha</li> <li>2. Menyusun jadwal Pendampingan dengan UMKM</li> <li>3. Persiapan Kebutuhan Coacing</li> <li>4. Coacing tentang Pembukuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha Makanan dan Minuman</li> <li>2. Pelaku usaha Perdagangan</li> </ol>	April-Desember 2021	Di Lokasi UMKM	Pendamping bidang SDM	
9	5 Koperasi difasilitasi dalam Pembukuan dan akuntansi Keuangan	1. Melakukan identifikasi Pengurus koperasi yang belum memahami tentang tata cara Pembuatan Pembukuan dan keuangan Koperasi SYARI;AH dan Penyusunan Akad Koperasi	Koperasi Syari;ah Baru Berdiri pada tahun 2020-2021	Mei 2021	PLUT KUMKM NTB	Pendamping bidang SDM	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyepakati jadwal Coaciong Pengurus Koperasi</li> <li>3. Pelaksanaan Coacing</li> </ol>					
10	10 Koperasi difasilitasi Pelaksanaan RAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata Koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM provinsi NTB yang belum menjalankan RAT tahun Buku 2020</li> <li>2. Koordinasi dengan Pengurus terkait Pelaksanaan RAT</li> <li>3. Memfasilitasi Pembuatan laporan RAT</li> <li>4. Koordinasi dengan dinas Koperasi dan UKM provinsi NTB tentang Pelaksanaan RAT bagi sasaran Pendampingan</li> <li>5. Pemetaan Kebutuhan Pelaksanaan RAT</li> <li>6. Mendampingi Pelaksanaan RAT</li> </ol>	Koperasi yang belum melaksanakan Rat Tahun buku 2019 dan tahun buku 2020	Maret- Desember 2021	Di Lokasi Koperasi Dampungan	Pendamping Bidang SDM	
11	40 UMKM mendapatkan Pelatihan tentang Kewirausahaan	Pendidikan tentang Kewirausahaan	Wirausaha baru	Juli 2021	PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang SDM	
12	Pengembangan 5 sentra UKM (1 Desa 1 Produk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan sasaran Menjadi lokasi centra UMKM</li> <li>2. FGD dalam rangka mengagali sumber daya dan potensi di Desa Setempat</li> <li>3. Menyusun Rancang Bisnis</li> <li>4. Loka Karya dalam Membentuk Pengelolaan Bisnis</li> <li>5. Pelatihan Pelatihan dan bimbingan Tehknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kewirausahaan</li> <li>b) Pelatihan Pembuatan Produk</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Anggaraksa Kec Pringgabaya</li> <li>2. Desa Bunut Baok Kec. Praya</li> <li>3. Desa Bayan Kec Bayan</li> <li>4. Desa ..</li> <li>5.</li> </ol>	Maret-Desember 2021	Di Desa sasaran Dampungan	Pendamping Bidang SDM	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pelatihan Vokasional ( Kemasan</li> <li>d) Manajemen usaha</li> <li>e) Manajemen keuangan</li> <li>f) Legalitas dan Legalitas Produk</li> <li>g) Pemasaran</li> </ul>					
13	200 Pelaku usaha Memiliki Naskah Izin Usaha dalam Bentuk NIB, IUMK, Lamp.IUMK, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran Pormulir Pengajuan izin Usaha</li> <li>2. Pelayanan di PLUT KUMKM NTB</li> <li>3. Melakukan Infut data di sistem</li> <li>4. Penyerahan Naskah Izin Usaha kepada sasaran Pendampingan</li> </ol>	Semua jenis Usaha	Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB dan Lokasi UMKM	Pendamping Bidang Kelembagaan	
14	300 UMKM Memiliki Pemahaman tentang arti Penting izin Usaha dan fungsi masing izin Usaha	<p>Memasyarakatkan tentang arti Penting izin usaha Melalui sosialisasi</p> <p>Membuat fanplat yang di sebarakan ke Pelaku usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membahas content Panplat</li> <li>b. Melakukan Pencetakan Panplat</li> <li>c. Penyebarluasan</li> </ol>	UKM Centra	April-Desember	Tentatif	Pendamping Bidang Kelembagaan	
15	Melahirkan 30 Tenaga Volenteer,yang memfasilitasi UKM centra perizinan Usaha Melalui OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Calon Volenteer berasal dari UKM Centra</li> <li>2. TOT Calon Volenteer</li> <li>3. Pembuatan Grup Watshap Volenter</li> <li>4. Evalausi capaian Kerja Volentter dalam memfasilitasi UKM Perizinan Usaha</li> </ol>	Perwakilan UKM Centra	Agustus 2021	PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Kelembagaan	
16	Terbentuknya 7 Koperasi syari'ah baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang Koperasi syari'ah</li> <li>2. Memfasilitasi Pendirian Koperasi</li> <li>3. Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Pengajuan akte dan badan Hukum Koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pondok Pesantren</li> <li>2. Kelompok usaha yang layak Secara kelembagaan</li> </ol>	Maret-November 2021	Di Lokasi Pendirian Koperasi	Pendamping Bidang Kelembagaan	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pendampingan Pengajuan Akte dan badan Hukum Koperasi</li> <li>5. Pengawasan proses pemvbuat akte dan badan Hukum Koperasi</li> <li>6. Penyerahan Akte dan badan Hukum Koperasi</li> <li>7. Penataan Kelembagaan Koperasi</li> </ol>	3. Centra UKM				
17	Memfasilitasi 5 Koperasi baru yang berbadan Hukum dalam Peningkatan Jumlah anggota koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temu Pendamping dengan Pengurus koperasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FGD tentang Metode yang digunakan dalam upaya Peningkatan Jumlah anggota</li> <li>b. Pemetaan titik titik Sosialisasi</li> <li>c. Penyusuna Jadwal pelaksanaan Sosialisasi masing masing Koperasi</li> </ol> </li> <li>2. Sosialisasi</li> <li>3. Evaluasi</li> </ol>	1. Koperasi Baru yang berdiri pada tahun 2020 dan 2021	Mei-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB Lokasi sosialisasi	Pendamping Bidang Kelembagaan	
18	5 Koperasi di fasilitasi dalam Penyusunan rencana kerja dan anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Syari'ah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusun Draf Rencana Kerja dan RAPBKS</li> <li>2. Memfasilitasi Rapat anggota dalam pengesahan RAPBKS</li> </ol>	Koperasi syari'ah yang belum memiliki Rencana Kerja dan RAPBKS tahun 2021	April 2021	Di kantor Koperasi saaran pendampingan	Pendamping Bidang Kelembagaan	
19	50 UMKM mendapatkan informasi tentang Akses Permodalan baik dari lembaga keuangan maupun non Lembaga lembaga Keuangan	Memperoleh informasi pembiayaan sehingga dapat mengetahui beberapa sumber pembiayaan modal usaha yang tersedia sesuai jenis usaha, skala usaha maupun berdasarkan project dan kemampuan pengembalian modal usaha.	Pelaku UMKM yang belum mengakses permodalan	Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB Dilokasi UMKM	Pendamping Bidang Pembiayaan	

20	30 UMKM di fasilitasi dan mediasi akses pembiayaan dan permodalan usaha bagi UMKM ke lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Kordinasi dan kerjasama dengan lembaga Keuangan maupun non lembaga keuangan</li> <li>2. Memberikan informasi kepada UMKM tentang syara syarat Pengajuan pembiayaan</li> <li>3. Menganalisis kelayakan Usaha UMKM</li> <li>4. Pendampingan Pengajuan pembiayaan dan Permodalan Usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UMKM yang belum mendapatkan Pembiayaan dari lembaga Keuangan maupun non keuangan</li> <li>2. UMK yang Layak Usahanya</li> </ol>	Maret-Desember 2021	Tentatif	Pendamping Bidang Pembiayaan	
21	15 UMKM didampingi dalam penyusunan Proposal Pengembangan usaha, perencanaan Bisnis dan manajemen keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi Usaha UMKM <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal pendampingan Pembuatan Proposal</li> <li>b. Melakukan koordinasi Kepada Pihak yang menjadi sasaran Proposal</li> <li>c. Melakuka Pengawasan terhadap proposal pengembangan Usaha bagi UMKM</li> </ol> </li> </ol>	UMKM olahan makanan dan Minuman dan lain lain	Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB dan Lokasi UMKM	Pendamping Bidang Pembiayaan	
22	Galery PLUT sebagai Pusat Promosi Pemasaran produk UMKM <i>One stop shopping for regional souvenirs</i>	Refresh Konsep display dan update Produk unggulan UMKM secara continue digalery tiap bulan (Target display masing masing Kabupaten kota memiliki produk unggulan Daerah)	Galery PLUT KUMKM NTB	Maret 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran	
23	Membuat konsep promosi pemasaran galery yang telah ada melalui kampanye	Bekerjasama dengan UKM membentuk kelompok membangun WOM ( <i>word of Mouth</i> ) Positif Melalui <i>strategy viral marketing</i> di lingkup UMKM dan masyarakat	UMKM	Maret-April 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran	

	pemasaran yang tersistem dan tetap sasaran	umum agar keberadaan PLUT beserta galerynya sebagai rumah UMKM dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha dan <i>stakeholder</i> .					
24	Adanya Portal Galery KUMKM di marketplace beserta content Marketing			April 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran dan IT	
25	30 UMKM Memiliki Pemahaman tentang Pemasaran Melalui Online	Bimtek tentang Digital Mareketing		Mei 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran dan IT	
26	Kampanye pemasaran dengan membuat Content Marketing untuk Branding Image PLUT KUMKM NTB diberbagai media sosial	1. Membahas isi Content 2. Aksi kampanye melalui media sosial		Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran dan IT	
27	50 UMKM Memiliki Pengetahuan tentang strategy Pemasaran dan Model Kampanye Pemasaran (promosi yang sesuai dengan level bisnis UMKM	Konsultasi, Bimtek dan Lain lain	UMKM olahan Makanan, Minuman UMKM kerajinan	Maret-Desember 2021	Di PLUT KUMKM NTB		

28	50 UMKM mendapatkan Informasi pasar (bazar, event. Pameran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran melalui Grop watshap UMKM</li> <li>2. Media sosial Lain</li> <li>3. Informasi langsung kepada UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat UMUM</li> <li>2. UMKM</li> </ol>	Maret- November 2021	Tentatif	Pendamping Bidang Pemasaran	
29	Adanya Pojok UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir PLUT KUMKM NTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB</li> <li>2. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan peroranga</li> <li>2. Kerjasama dengan koperasi</li> <li>3. Kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan non pemerintah</li> </ol>	Mei 2021	Di PLUT KUMKM NTB	Pendamping Bidang Pemasaran	
30	Fasilitasi 20 UKM Promosi , Pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM melalui pameran dan buyer langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi dengan intansi terkait kerjasama</li> <li>2. Berkoordinasi dengan koordinasi dengan Dinas Koperasi</li> <li>3. Meromendasikan UKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan dinas perdagangan</li> <li>2. Memfasiltasi UKM untuk mendapatkan rekomendasi dengan dinas perdagangan setempat</li> </ol>	Maret – Desember 2021	5 Kabupaten se pulau Lombok	2 orang Pendamping (Bidang jaringan usaha dan pemasaran)	29
31	Memfasilitasi 15 KUMKM kerjasama dengan SKPD, Ritle Moderen,dan Toko oleh-oleh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi dengan intansi terkait kerjasama</li> <li>2. Berkoordinasi dengan koordinasi dengan Dinas Koperasi</li> <li>3. Melakukan kerjasama dengan Toko oleh-oleh, Ritel, SKPD terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasiltasi UKM untuk mendapatkan rekomendasi dengan dinas perdagangan setempat</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait</li> </ol>	April-Juli 2021	5 Kabupaten se pulau Lombok	Jaringan Kerjasama	30

32	Fasilitasi Promosi , Pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM melalui Gallery PLUT KUMKM NTB			Maret-Desember 2021	Galerry	2 orang Pendamping (Bidang jaringan usaha dan pemasaran)	31
33	Memfasilitasi umkm promosi dan kerjasama di pondok pesantren terkait promosi produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi dengan pihak pondok pesantren</li> <li>2. Berkoordinasi dengan koordinasi dengan Dinas Koperasi</li> <li>3. Melakukan kerjasama Pondok Pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi UKM untuk untuk kerjasama dengan pondok pesantren</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan pondok pesantren</li> </ol>	Juli-Agustus 2021	5 Kabupaten se pulau Lombok	jaringan kerjasama	32
34	Fasilitasi 5 UKM Standarisasi Produk (Halal, HACCP, MD, SNI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan komunikasi dengan pihak MUI, BSN</li> <li>2. Berkoordinasi dengan koordinasi dengan Dinas Koperasi</li> </ol>	Memfasilitasi UKM untuk Mendapatkan (Halal, HACCP, MD, SNI)	Maret-Desember 2021	5 Kabupaten se pulau Lombok	Pendamping Jaringan kerjasama, Produksi, dibantu pendamping Kelembagaan, dan IT	33

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2019 - 2023, sebagai berikut :

**Tabel. 2.12**

### **Indikator Kinerja Utama 2019 – 2023**

#### **Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Jumlah Koperasi Modern	Kop	3
2.	Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah	%	11,23
3.	Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	PUM	3

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2021

Untuk lebih jelasnya Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dapat dilihat pada lampiran 1 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada lampiran 2.

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 2.13**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koperasi Modern dan Berdaya Saing	1. Jumlah Koperasi Modern	3 Kop
		2. Persentase Pertumbuhan KSP/ USP yang menerapkan Pola Syariah	11,23%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil	1. Jumlah Usaha yang menjadi Wirausaha.	40 PUK

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2021

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 4. Ada beberapa kebijakan, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Koperasi Modern dan Berdaya Saing;
- b. Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil;

Sedangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Sasaran Strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya setiap “Sasaran Strategis” yang tertuang pada “Perjanjian Kinerja Tahun 2021”, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1.** Meningkatkan Koperasi Modern dan Berdaya Saing

Dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Koperasi Modern;
2. Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Pola Syariah

Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah**  
Dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Usaha yang Menjadi Wirausaha

Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2. Program Pengembangan UMKM
  - 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan sasaran, kebijakan program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja dilakukan secara kontinyu. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dapat meningkat.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 serta formulir Perjanjian Kinerja, yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan yang hendak dilaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

##### **a. Target dan Realisasi Kinerja 2021**

Berdasarkan target Indikator Kinerja dan realisasi capaian Kinerja tahun 2021, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dimana secara umum dapat dikatakan semua sasaran strategis terlaksana dengan baik.

Gambaran kondisinya dituangkan dalam Tabel dibawah ini dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Tabel 3.1) :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Capaian Atas Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Koperasi Modern dan Berdaya Saing	1 Jumlah Koperasi Modern	3 Kop	3 Kop	100
		2 Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Pola Syariah	11,23%	13,92%	123,95
2	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	1 Jumlah Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	3 PUM	0	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut sudah dapat mencapai target.

**b. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2020 dan 2021**

Dalam menentukan keberhasilan suatu capaian pada tahun berjalan dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Perbandingan perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Capaian**  
**Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Program	2020		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif	501.980.000	499.950.000	99,60
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	467.109.500	336.401.204	72,02
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	367.000.000	133.400.000	36,35
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	176.937.100	147.427.100	83,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.513.026.600</b>	<b>1.416.121.508</b>	<b>73,84</b>

**Target dan Realisasi Capaian**  
**Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Program	2021		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	161.749.000	71.055.400	43,93
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1.204.804.000	1.083.142.000	89,90
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	407.737.000	321.987.800	78,97
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.232.568.600	1.095.019.158	88,84
5	Program Pengembangan UMKM	25.985.000	20.898.500	80,43
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	903.974.100	883.479.800	7,73
7	Program Pengembangan UMKM	1.448.105.900	1.300.301.500	89,79
<b>TOTAL</b>		<b>5.384.923.600</b>	<b>4.775.884.158</b>	<b>88,69</b>

### c. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2021 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Seluruh Indikator Kinerja dinyatakan berhasil dilaksanakan. Adapun penyebab keberhasilan dalam mencapai target masing-masing adalah sebagai berikut :

a) **Sasaran Strategis 1, *Meningkatnya Koperasi Modern dan Berdaya Saing***, dicapai melalui 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan kegiatan :
  - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

b) **Sasaran Strategis 2. *Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah***, dicapai melalui 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2. Program Pengembangan UMKM
  - 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Realisasi penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan terdapat efisiensi anggaran, tanpa mengurangi realisasi kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB pada tahun 2021. Namun terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Pada 7 (tujuh) kegiatan prioritas yang termasuk dalam Perjanjian Kinerja terdapat realokasi anggaran pada kegiatan dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Refocusing Anggaran Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**  
**Tahun Anggaran 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		PERUBAHAN	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>175.000.000</b>	<b>161.749.000</b>	<b>-13.251.000</b>	<b>Berkurang</b>
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		161.749.000		
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat		128.335.700		
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel		33.413.300		
2	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.204.804.000</b>	<b>154.804.000</b>	<b>Bertambah</b>
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		1.204.804.000		
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		1.141.840.000		
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		62.964.000		
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>500.000.000</b>	<b>407.737.000</b>	<b>-92.263.000</b>	<b>Berkurang</b>
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		407.737.000		
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		260.391.000		
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		147.346.000		

4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.280.297.500</b>	<b>1.232.568.600</b>	<b>-47.728.900</b>	<b>Berkurang</b>
	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>				
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		1.232.568.600		
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>692.952.500</b>	<b>25.985.000</b>	<b>-666.967.500</b>	<b>Berkurang</b>
	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>				
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	692.952.500	25.985.000		
6	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>922.894.100</b>	<b>903.974.100</b>	<b>-18.920.000</b>	<b>Berkurang</b>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	922.894.100	903.974.100		
7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1.429.185.900</b>	<b>1.448.105.900</b>	<b>18.920.000</b>	<b>Bertambah</b>
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.429.185.900	1.448.105.900		
	<b>JUMLAH SEMUA</b>	<b>6.050.330.000</b>	<b>5.384.923.600</b>	<b>665.406.400</b>	<b>Berkurang</b>



Berdasar tabel diatas pada tahun 2021 Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pengurangan anggaran akibat Perubahan Anggaran sebesar Rp. 665.406.400,-

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB telah merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagaimana tersebut dibawah :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
<b>A</b>	<b>DINAS KOPERASI UKM PROV. NTB</b>	<b>12.583.381.137</b>	<b>11.382.369.200</b>	<b>1.201.011.937</b>	<b>90,46</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.405.706.037</b>	<b>7.266.796.604</b>	<b>138.909.433</b>	<b>98,12</b>
	<b>GAJI DAN TUNJANGAN</b>	<b>7.405.706.037</b>	<b>7.266.796.604</b>	<b>138.909.433</b>	<b>98,12</b>
	Belanja Gaji Pokok Pegawai	3.797.599.037	3.767.918.760	29.680.277	99,22
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	377.736.024	349.984.783	27.751.241	92,65
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	287.420.000	269.600.000	17.820.000	93,80
	Belanja Tunjangan Fungsional	89.400.000	86.100.000	3.300.000	96,31
	Belanja Tunjangan Umum	123.600.000	105.580.000	18.020.000	85,42
	Belanja Tunjangan Beras PNS	210.000.000	207.048.780	2.951.220	98,59
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.800.000	18.739.690	2.060.310	90,09
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.399	44.991	17.408	72,10
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.201.555.285	1.191.434.499	10.120.786	99,16
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	88.412.007	72.460.602	15.951.405	81,96
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.201.555.285	1.191.434.499	10.120.786	99,16
	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	7.566.000	6.450.000	1.116.000	85,25
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.405.706.037</b>	<b>7.266.796.604</b>	<b>138.909.433</b>	<b>98,12</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>	<b>5.177.675.100</b>	<b>4.115.572.596</b>	<b>1.062.102.504</b>	<b>79,49</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>439.096.000</b>	<b>326.364.000</b>	<b>112.732.000</b>	<b>74,33</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	197.698.300	165.841.700	31.856.600	83,89
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.934.300	30.810.200	124.100	99,60
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.128.800	20.038.600	9.090.200	68,79
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.409.800	5.949.800	10.460.000	36,26
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.018.900	7.018.900	3.000.000	70,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.234.600	25.183.700	1.050.900	95,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.671.300	71.521.100	57.150.200	55,58
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>68.090.100</b>	<b>50.191.800</b>	<b>17.898.300</b>	<b>73,71</b>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.709.000	30.578.200	14.130.800	68,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.682.700	9.943.600	3.739.100	72,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.698.400	9.670.000	28.400	99,71
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>26.190.600</b>	<b>3.749.900</b>	<b>22.440.700</b>	<b>14,32</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26.190.600	3.749.900	22.440.700	14,32
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.800.000</b>	<b>12.320.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>40,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.800.000	12.320.000	18.480.000	40,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>323.194.700</b>	<b>165.316.700</b>	<b>157.878.000</b>	<b>51,15</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.041.000	7.428.900	612.100	92,39
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	4.559.500	1.440.500	75,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	560.000	940.000	37,33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.931.400	20.496.050	4.435.350	82,21
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.541.600	4.764.100	2.777.500	63,17
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.680.000	20.385.000	47.295.000	30,12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.261.000	29.922.000	7.339.000	80,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.188.200	93.210.900	61.977.300	60,06

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.051.500	12.953.900	2.097.600	86,06
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>212.305.600</b>	<b>206.588.000</b>	<b>5.717.600</b>	<b>97,31</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.370.000	42.180.000	190.000	99,55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.935.600	164.408.000	5.527.600	96,75
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>795.414.500</b>	<b>690.349.470</b>	<b>105.065.030</b>	<b>86,79</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.315.000	2.875.000	2.440.000	54,09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.650.000	154.274.470	29.375.530	84,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.449.500	533.200.000	73.249.500	87,92
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.740.000</b>	<b>187.140.068</b>	<b>62.599.932</b>	<b>74,93</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.340.000	146.952.568	57.387.432	71,92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	18.187.500	5.212.500	77,72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000	22.000.000	-	100
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>161.749.000</b>	<b>71.055.400</b>	<b>77.440.300</b>	<b>43,93</b>
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	128.335.700	71.055.400	57.280.300	55,37
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel	33.413.300	13.253.300	20.160.000	39,66
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.204.804.000</b>	<b>1.083.142.000</b>	<b>121.662.000</b>	<b>89,90</b>
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	1.141.840.000	1.040.182.000	101.658.000	91,10
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	62.964.000	42.960.000	20.004.000	68,23
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>407.737.000</b>	<b>321.987.800</b>	<b>85.749.200</b>	<b>78,97</b>
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	260.391.000	198.669.000	61.722.000	76,30
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	147.346.000	123.318.800	24.027.200	83,69
	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.232.568.600</b>	<b>1.095.019.158</b>	<b>137.549.442</b>	<b>88,84</b>
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.232.568.600	1.095.019.158	137.549.442	88,84
	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>25.985.000</b>	<b>20.898.500</b>	<b>5.086.500</b>	<b>80,43</b>
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	25.985.000	20.898.500	5.086.500	80,43
<b>B</b>	<b>BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB</b>	<b>2.826.543.400</b>	<b>2.559.475.575</b>	<b>267.067.825</b>	<b>90,55</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.826.543.400</b>	<b>1.266.490.075</b>	<b>1.560.053.325</b>	<b>44,81</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>2.826.543.400</b>	<b>2.559.475.575</b>	<b>267.067.825</b>	<b>90,55</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>474.463.400</b>	<b>375.694.275</b>	<b>98.769.125</b>	<b>79,18</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.084.000	21.669.000	10.415.000	67,54
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.709.500	1.396.500	10.313.000	11,93
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	820.500	760.500	60.000	92,69
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.737.400</b>	<b>13.355.700</b>	<b>13.381.700</b>	<b>49,95</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.784.200	3.022.600	761.600	79,87

	Penyediaan Barang Logistik Kantor	12.727.000	5.088.400	7.638.600	39,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.826.200	2.384.700	2.441.500	49,41
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	2.860.000	2.540.000	52,96
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>336.788.000</b>	<b>295.719.352</b>	<b>41.068.648</b>	<b>87,81</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.756.000	4.356.000	400.000	91,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	61.980.000	41.363.352	20.616.648	66,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.052.000	250.000.000	20.052.000	92,57
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.324.000</b>	<b>42.793.223</b>	<b>23.530.777</b>	<b>64,52</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000	30.531.223	20.708.777	59,58
	Pemeliharaan Mebel	-			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.782.000	2.960.000	2.822.000	51,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.302.000	9.302.000	-	100
	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>903.974.100</b>	<b>883.479.800</b>	<b>20.494.300</b>	<b>7,73</b>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	903.974.100	883.479.800	20.494.300	7,73
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>1.448.105.900</b>	<b>1.300.301.500</b>	<b>147.804.400</b>	<b>9,79</b>
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.448.105.900	1.300.301.500	147.804.400	9,79
	<b>JUMLAH SEMUA</b>	<b>15.409.924.537</b>	<b>13.941.844.775</b>	<b>1.468.079.762</b>	<b>90,47</b>

**Tabel 3.5****Target dan Realisasi Anggaran Pada Perjanjian Kerja**

No	Program	2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b> 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<b>161.749.000</b>	<b>71.055.400</b>	<b>43,93</b>
		161.749.000	71.055.400	43,93
2	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b> 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>1.204.804.000</b>	<b>1.083.142.000</b>	<b>89,90</b>
		1.204.804.000	1.083.142.000	89,90
3	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b> 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>407.737.000</b>	<b>321.987.800</b>	<b>78,97</b>
		407.737.000	321.987.800	78,97
4	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b> 1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>1.232.568.600</b>	<b>1.095.019.158</b>	<b>88,84</b>
		1.232.568.600	1.095.019.158	88,84
5	<b>Program Pengembangan UMKM</b> 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<b>25.985.000</b>	<b>20.898.500</b>	<b>80,43</b>
		25.985.000	20.898.500	80,43
6	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b> 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<b>903.974.100</b>	<b>883.479.800</b>	<b>89,79</b>
		903.974.000	883.479.800	89,79

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2021 dibiayai dengan sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada DPPA Nomor DPPA/B.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.756.283.228,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021**

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Tidak Langsung	7.405.706.037	7.266.796.604	98,12
2	Belanja Langsung	5.177.675.100	4.115.572.596	79,49
<b>Jumlah</b>		<b>12.583.381.137</b>	<b>11.382.369.200</b>	<b>90,46</b>

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa Anggaran Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 tersedia sebesar **Rp. 15.409.924.537,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 13.941.844.775,-** atau **(90,47 persen)**, sedangkan realisasi menurut kelompok belanja adalah anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 7.405.706.037,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 7.266.796.604,-** atau **(98,12 persen)** dan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.177.675.100,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 4.115.572.596,-** atau **(79,49 persen)**.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

4.1.1. Progres fisik yang telah dicapai untuk mendukung Renstra tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1, Indikator Kinerja 1:**

*Indikator Kinerja 1.*

**Sasaran Strategis 2, Indikator Kinerja 1 :**

*Indikator Kinerja 1.*

#### **4.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **4.2.1 Permasalahan**

Dari seluruh indikator kinerja (9 indikator), 6 indikator telah melampaui capaian target lebih dari 100% yaitu Indikator Kinerja Jumlah KSP Yang Meningkat; Jumlah KUMKM Dengan Kualifikasi; Jumlah Koperasi Baru Yang Terbentuk; jumlah sentra UMKM berbasis koperasi dan Jumlah SDM KUMKM Yang Berkualitas) dan 2 indikator di bawah 100% (Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas; Jumlah KSPPS/USPPS yang terbentuk dan aktif; dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM
2. Kurangnya akses permodalan bagi Koperasi dan UKM untuk Pengembangan Usaha.
3. Kurangnya akses teknologi Koperasi dan UKM baik dalam penerapan maupun pemanfaatannya.
4. Kurangnya jaringan usaha maupun Lembaga Konsultasi Usaha bagi Koperasi dan UKM
5. Lemahnya organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM, khususnya di tingkat pengelola Koperasi dan UKM
6. Kurangnya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM

7. Rendahnya kepedulian dan pembinaan dari Instansi/Dinas Sektoral baik vertical maupun horisontal
8. Kurangnya Tenaga Penyuluh koperasi dan UKM

#### **4.2.2 Solusi**

1. Mendorong Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM melalui APBN selain itu bermitra dengan NGO.
2. Mendorong pemerintah pusat, NGO, perbankan dan swasta untuk membuka akses permodalan dengan bunga yang rendah bagi koperasi dan UMKM.
3. Bermitra dengan Dinas Kominfotik, pihak swasta, NGO untuk membuka akses bagi penerapan dan pemanfaatan IT.
4. Meningkatkan kualitas penyedia jasa pengembangan usaha (PS) dan memperluas jaringan usaha dan jiwa kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM untuk mengelola Koperasi dan UKM secara kontinue dan professional
6. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan PERDA untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Meningkatkan koordinasi instansi/Dinas Sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik vertikal maupun horisontal.
8. Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga penyuluh dibidang koperasi dan UKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga penyuluh koperasi dan UKM.